

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti.

Tabel 2.1 Review Penelitian

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kesiapan Dalam Menerapkan SAK EMKM. Oleh: Trisomantagani, K.A., <i>et.all</i> (2017)	kompetensi SDM, persepsi UMKM, kesiapan implementasi SAK EMKM	Hasil penelitian pada 96 UMKM Di Kecamatan Buleleng ditemukan bahwa persepsi UMKM terhadap kemudahan penggunaan dan kompetensi SDM mempengaruhi kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM.
2	Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Oleh: Narsa, I.M, <i>et.al</i> (2012)	Akuntansi, SAK ETAP, UMKM	Hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa UMKM masih belum memiliki laporan keuangan. Namun ada juga UMKM yang memahami pentingnya catatan keuangan yang baik dan usahanya dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan UMKM yang lain yang tidak membuat laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang baik UMKM tersebut telah mampu mengatasi masalah kekurangan modal sehingga usahanya dapat berkembang lebih maju. Dari hasil yang ditemukan dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM belum siap menerapkan SAK

			ETAP dalam laporan keuangannya.
3	<p>Pemahaman Dan Kesiapan UKM Dalam Implementasi SAK ETAP : Survey Pada UKM Di Bekasi</p> <p>Oleh : Cahyati, A.D, <i>et.al</i> (2011)</p>	<p>Pemahaman , kesiapan, Implementasi SAK ETAP, , UMKM</p>	<p>Hasil penelitian diketahui UKM di Bekasi telah membuat laporan keuangan dan laporan pajak. Sebanyak 60% UKM membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk keperluan manajemen dan pengajuan kredit. Dan sebanyak 35% UKM mengetahui SAK ETAP telah berlaku sejak 2010. pemahaman UKM atas SAK ETAP masih rendah namun UKM sudah siap dan bersedia mengimplementasikan SAK ETAP.</p>
4	<p>Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP Dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM Di Kabupaten Kuningan</p> <p>Oleh: Rahmawati, T. dan Puspasari, O.R. (2016)</p>	<p>UMKM, SAK ETAP, Akses Perbankan, Kualitas Laporan Keuangan, Akses Perbankan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 5% UMKM yang paham tentang SAK ETAP. Delapan puluh satu UMKM menganggap laporan keuangan penting untuk perkembangan usahanya. UMKM sudah menyadari pentingnya laporan keuangan namun masih banyak dari mereka yang belum paham tentang bagaimana isi dan penerapan dari SAK ETAP. Dari hasil penelitian yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa UMKM Di Kabupaten Kuningan belum siap menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dikarenakan sebagian UMKM belum paham tentang SAK ETAP.</p>
5	<p>Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP</p> <p>Oleh: Rudiantoro, R. dan Siregar, S.V. (2012)</p>	<p>kualitas laporan keuangan, UMKM, kredit, SAK ETAP</p>	<p>Hasil penelitian UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki persepsi bahwa pembukuan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang penting dalam perkembangan usahanya. Kualitas laporan keuangan UMKM masih sangat rendah. Dan UMKM masih belum memungkinkan untuk menerapkan</p>

			SAK ETAP. Karena adanya kendala terbesar yaitu pemahaman tentang SAK ETAP. Selain itu kendala lainnya yaitu belum mendapatkan informasi atau sosialisasi dan pendidikan pelaku usaha yang rendah.
6	<i>Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standards Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMKM)</i> Oleh: Samsiah, S. dan Lawita, N.F. (2017)	UMKM, laporan keuangan, SAK EMKM	Hasil penelitian menunjukkan beberapa dari pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan dalam kegiatan usahanya. Pelaku UMKM tidak melakukan pembukuan. Mereka hanya berfokus pada produksi dan pemasaran. Karena alasan tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam menyusun laporan keuangan. Dari hasil penelitian maka diketahui bahwa UMKM belum siap megimplementasikan SAK EMKM.
7	<i>Financial Reporting in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Nigeria. Challenges and Options.</i> Oleh : Ezeagba, Charles (2017)	Laporan keuangan , UKM, Persiapan dan penyajian	Hasil penelitian ini menemukan bahwa tantangan yang dihadapi UKM dalam persiapan dan penyajian laporan keuangan adalah pembukuan dan catatan akuntansi yang dibuat UKM selama ini tidak memadai karena tidak adanya tenaga kerja yang kompeten dibidang akuntansi. sistem akuntansi untuk pembukuan transaksi UKM hanya dapat dilakukan oleh akuntan profesional di Nigeria yaitu layanan jasa dari ICAN dan ANAN..

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini meneliti tentang kesiapan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahyati, A.D., *et.al* (2011) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Cahyati terdapat pada obyek

yang diteliti. Pada penelitian Cahyati yang diteliti adalah kesiapan untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan ETAP dan obyek yang diteliti yaitu seluruh UMKM yang berada di Bekasi. Sedangkan dalam penelitian ini obyek yang diteliti hanya UMKM pengrajin mebel di wilayah Mojowarno.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Teori Kesiapan

Kesiapan merupakan suatu keadaan seseorang yang akan membuatnya mampu menghadapi perubahan yang terjadi. Menurut Sanusi (2005:22) dalam Fatchurrochman, R. 2011 “kesiapan merupakan kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu”. Menurut Slameto (2010:113) dalam Mulyani, D. 2013, “kesiapan adalah keseluruhan kondisi individu yang menjadikannya siap untuk merespon atau memberikan jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu”.

Penelitian Rahmawati, T dan Puspasari, O.R (2016) penilaian kesiapan UMKM dalam menerapkan standara akuntansi keuangan dapat diketahui dari pemahaman pelaku usaha tentang standar akuntansi keuangan, pelaku usaha telah melakukan Pembukuan secara rutin, terdapat pegawai khusus pembukuan, terdapat software akuntansi, pembukuan berpedoman pada standar akuntansi.

Kesiapan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana kesiapan para pelaku UMKM yang akan melakukan perubahan dari standar akuntansi sebelumnya menuju SAK EMKM. Kesiapan ini dapat diketahui

dari seberapa paham para pelaku usaha tentang SAK EMKM dan apakah UMKM sudah membuat pembukuan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku sebelumnya. Apakah UMKM memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan pembukuan, atau UMKM telah menggunakan software akuntansi dalam menginput transaksinya. Jika ternyata pelaku UMKM tidak mengetahui sama sekali tentang SAK EMKM dan tidak pernah membuat pembukuan, tidak memiliki SDM khusus pembukuan, tidak memiliki software akuntansi, maka UMKM tersebut dinilai belum siap untuk menerapkan SAK EMKM. Namun jika UMKM telah memahami tentang SAK EMKM dan telah membuat pembukuan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan, maka UMKM tersebut dinilai telah siap menerapkan SAK EMKM.

2.2.2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1) Definisi UMKM

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh

perorangan atau badan usaha usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang.

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam SAK EMKM sebagai berikut;

“Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut” (Ikatan Akuntan Indonesia , 2016)

BPS (Badan Pusat Statistik) menggolongkan besar kecilnya usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki tanpa memperhatikan penggunaan teknologi dan besaran modal. Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa industri menengah adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 20 – 99 orang. Industri kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. Sedangkan industri mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 1-4 orang.

2) Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut;

Usaha Mikro : memiliki aset bersih maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan maksimal Rp. 300.000.000,-

Usaha Kecil : memiliki aset bersih sebanyak Rp 50.000.000 s/d Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan sebanyak Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000,-

Usaha Menengah : memiliki aset bersih sebanyak Rp 500.000.000 s/d Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan sebanyak Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000,-

3) **Permasalahan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

UKM masih menghadapi banyak permasalahan dalam mengembangkan bisnisnya, menurut Setyobudi, 2007 (dalam Rokhayati, I Dan Lestari, H.D. 2016) membagi permasalahan UKM menjadi 3 antara lain:

- 1) Permasalahan dasar pada UKM (basic problems), yaitu permasalahan modal, badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
- 2) Permasalahan lanjutan (advanced problems), yaitu pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan permintaan pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di Negara tujuan ekspor.

3) Permasalahan antara (intermediate problems), yaitu suatu permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan dasar agar dapat menghadapi permasalahan lanjutan dengan baik. Permasalahan tersebut berkaitan dengan manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan

2.2.3. Standar Akuntansi Keuangan EMKM

1. Standar Akuntansi Keuangan EMKM

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dalam peraturan undang-undang setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Jika otoritas mengizinkan entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku (Sodikin, S. S. dan Riyono, B.A. 2012), Tujuan laporan keuangan dibagi menjadi dua perspektif yaitu perspektif informasi dan perspektif pertanggungjawaban. Tujuan sebagai perspektif informasi adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang membutuhkan informasi tersebut. Tujuan sebagai perspektif pertanggungjawaban adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Pengguna laporan keuangan tersebut yaitu kreditor maupun investor.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam ((Sodikin, S. S. dan Riyono, B.A. 2012), ada empat karakteristik yang harus dipenuhi dalam membuat laporan keuangan yaitu,

1) Dapat dipahami

Informasi keuangan harus disajikan dalam bentuk dan bahasa yang mudah dipahami penggunanya.

2) Relevan

Informasi keuangan harus berpautan dengan tujuan pemanfaatannya yang lebih difokuskan kepada kepentingan umum pengguna.

3) Andal

Informasi keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang wajar.

4) Dapat diperbandingkan

Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan perioda waktu sebelumnya pada perusahaan yang sama atau perusahaan sejenis pada perioda yang sama.

Laporan keuangan entitas minimal terdiri dari:

(a) laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: 1) kas dan setara kas; 2) piutang; 3) persediaan; 4) aset tetap; 5) utang usaha; 6) utang bank; 7) ekuitas.

(b) laporan laba rugi

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

(c) catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan memuat: 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; 2) ikhtisar kebijakan akuntansi; 3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

2. Pengukuran dan pengakuan Pos-pos dalam Laporan Keuangan

1) Aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan diakui ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual dan diukur sebesar biaya perolehannya. Pada akhir periode laporan aset dan liabilitas diukur pada harga transaksi dikurangkan dengan seluruh pembayaran sampai pada tanggal tersebut.

2) Persediaan

Pengakuan persediaan sebesar harga perolehan. Teknik pengukuran biaya dapat menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Jika terdapat persediaan yang rusak atau usang, diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3) Investasi pada ventura bersama

Investasi pada ventura bersama diukur dengan biaya perolehannya dan tidak ada pengakuan ketika terjadi penurunan nilai atas investasi.

4) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran, maka biaya perolehan diukur sebesar harga aset yang diserahkan.

5) Penyusutan

Pengakuan terhadap aset tetap dihentikan ketika aset tetap dilepaskan, atau ketika sudah tidak ada manfaat ekonomiknya. Pengakuan keuntungan atas penjualan aset dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pengakuan kerugian ketika aset diserahkan maupun dimusnahkan dicatat sebagai beban lain-lain.

6) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah dicatat sebagai beban dibayar dimuka sebesar biaya perolehan. Jika aset dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

7) Liabilitas dan ekuitas

Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayar. Provisi dan liabilitas kontinjensi diakui hanya jika material. Liabilitas berhenti diakui saat telah dilunasi. Modal disetor baik berupa kas maupun nonkas dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran atau yang masih harus diterima baik yang terjadi atau yang akan terjadi. Jika kas yang akan diterima tidak dapat diukur, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima. Pendapatan penjualan atau penyediaan jasa diakui ketika barang telah dijual atau jasa telah diberikan. Beban imbalan kerja diakui sebesar nilai tidak terdiskonto. Pembayaran sewa, biaya pinjaman diakui sebagai beban. Jika jumlah kas keluar tidak dapat diukur atau waktu pengeluarannya tidak dapat dipastikan, maka beban diakui pada saat kas dibayar.

3. Peran Akuntansi

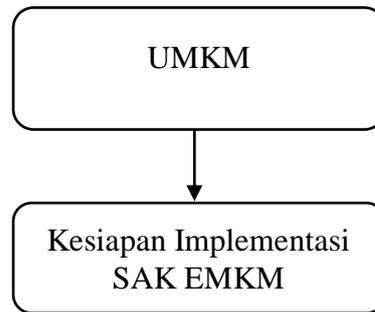
Akuntansi berperan besar dalam kemajuan suatu usaha. Laporan keuangan dapat digunakan UKM untuk menunjang kinerja usaha dengan cara memanfaatkan informasi keuangan yang ada untuk pengambilan keputusan. Menurut Ediraras (2010), manfaat informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan, yaitu. 1) Dasar

pertimbangan dalam pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi yan. 2) Keputusan mengenai harga 3) Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. 4) Untuk pengembangan usaha. 5) Penambahan dan pengembangan SDM serta penambahan asset usaha. Dengan menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan pelaku UKM dapat menilai kinerja usaha yaitu peningkatan penjualan, peningkatan laba, peningkatan jumlah produksi, efisiensi biaya.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan langkah-langkah yang akan dilakukan penulis dalam penelitiannya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih UMKM yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Selanjutnya, melakukan survei lapangan untuk mengetahui kesiapan UMKM untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan UMKM dapat diketahui dengan menganalisa pemahaman pelaku usaha tentang standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM. Kemudian menanyakan dan menganalisa apakah UMKM telah melakukan pembukuan secara rutin dan telah berpedoman pada standar akuntansi dalam pembukuannya, menanyakan apakah UMKM mempunyai pegawai khusus pembukuan, apakah terdapat software akuntansi. Yang terakhir yaitu menggabungkan semua informasi dan menyimpulkan apakah UMKM telah siap mengimplementasikan SAK EMKM.

Rerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ;



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual